



ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PADA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2022

*Johan Rizky Aditya¹, Ganjar Asdi Sudrajat², Mardito Galih Pringgodani³

¹Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta

²Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta

³Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Gresik

*Alamat Korespondensi: johanaditya@kemenkeu.go.id

Abstract

Fiscal decentralization, which grants authority over the management of Local Revenue (PAD), Transfers to Regions (TKD), and Regional Capital Expenditure, is expected to enhance regional economic growth. Despite possessing such authority and potential, Sampang Regency remains the area with the highest poverty rate and the lowest Human Development Index (HDI) in East Java. The purpose of this research is to analyze the effects of Local Revenue (PAD), Transfer to Regions (TKD), and regional capital expenditure on the economic growth of Sampang Regency. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative analysis through multiple regression, as well as qualitative methods such as observations and discussions with the local government of Sampang Regency. The findings indicate that PAD and TKD positively influence economic growth in Sampang Regency, whereas regional capital expenditure negatively impacts the economic growth of Sampang Regency.

Abstrak

Desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), serta Belanja Modal Daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, meskipun memiliki kewenangan dan potensi tersebut, Kabupaten Sampang masih menjadi daerah di Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, TKD, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan pendekatan kualitatif melalui observasi serta diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan TKD berpengaruh positif terhadap



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang, sebaliknya belanja modal daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang.

Keywords: Fiscal Policy, Public Expenditure, Infrastructure

JEL Classification: H50, H54

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan banyak manfaat ke daerah. Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah lokal, peningkatan keterlibatan komunitas dalam pembangunan lokal, penurunan disparitas antarwilayah, menjamin penyediaan layanan publik dasar di setiap wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (Nurhemi & Suryani, 2015). Lebih lanjut, Singh & Vasistha dalam Mittal & Naqvi, (2017) menambahkan bahwa salah satu keuntungan kunci dari desentralisasi fiskal adalah kontribusinya dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal.

Implementasi desentralisasi fiskal dapat ditandai dengan wewenang daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak daerah, serta pengelolaan kekayaan terpisah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menerima dana dari pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah. Tujuan utama desentralisasi fiskal melalui PAD dan TKD adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Purbadharmaja et al., 2019).

Kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diukur melalui beberapa parameter antara lain tingkat kemiskinan, capaian Indeks

Pembangunan Masyarakat (IPM), dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan publik, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, atau bahkan dengan pemberian bantuan langsung (Latupeirissa et al., 2024; Shahidi et al., 2019).

Belanja pemerintah, khususnya belanja modal untuk infrastruktur, merupakan jenis belanja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan pemerintah daerah karena memiliki efek pengganda ekonomi yang besar dan manfaat yang lebih terasa daripada belanja operasional seperti gaji pegawai (Ernawati et al., 2021; Mandala, 2020). Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur bahwa anggaran belanja pegawai dibatasi hanya maksimal 30% dari APBD total.

Implementasi desentralisasi fiskal pada 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan perbaikan dalam indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan. Namun, terdapat daerah di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan

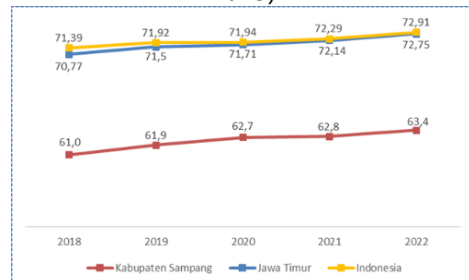
hasil yang berbeda, yaitu Kabupaten Sampang yang terletak di pulau Madura.

Berdasarkan parameter kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat kemiskinan, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sampang masih menempati posisi terendah dalam hal kemiskinan dan IPM selama dekade terakhir. Hal ini terjadi meskipun wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi signifikan dari sektor pertanian dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1 dan Grafik 2.

Desentralisasi fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah seharusnya dapat mendorong daerah untuk semakin mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan kesimpulan yang beragam, meskipun secara garis besar ditemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

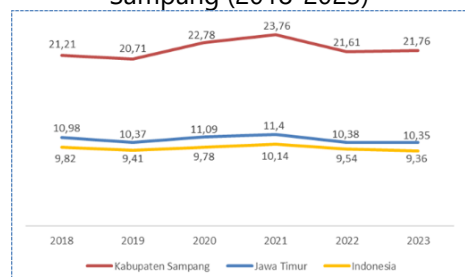
Pada kenyataannya, tidak semua daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik meskipun telah diberikan kewenangan melalui desentralisasi fiskal, salah satunya adalah Kabupaten Sampang. Daerah ini masih menghadapi masalah kemiskinan dan Pembangunan yang ditandai dengan IPM terendah dan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Kabupaten

Grafik 1 IPM Kabupaten Sampang (2018-2023)



Sumber: BPS Kab. Sampang, Jatim, dan Nasional 2018-2023, data diolah

Grafik 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sampang (2018-2023)



Sumber: BPS Kab. Sampang, Jatim, dan Nasional 2018-2023, data diolah

Sampang Tahun 2013-2022" ini perlu dilakukan untuk menginvestigasi apakah terdapat pengaruh PAD, TKD, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang.

Penelitian ini juga mencoba untuk mengisi *research gap* dalam penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal yaitu gap metodologi (*methodological gap*). Peneliti-peneliti sebelumnya hanya berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif berupa observasi lapangan untuk

mengumpulkan potensi ekonomi daerah, serta wawancara dengan perwakilan pemerintah daerah untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Sampang. Dengan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih komprehensif atas kendala dan potensi yang ditemukan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Sampang.

TINJAUAN LITERATUR

Desentralisasi Fiskal

Berbagai wilayah di Indonesia mengalami variasi dalam tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi masing-masing daerah. Kemandirian fiskal dan tanggung jawab pemerintah pusat yang dilimpahkan ke tingkat daerah berkaitan erat dengan desentralisasi (Fisher, 2022). Pemberian wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah merupakan wujud desentralisasi fiskal terutama untuk melakukan hal-hal seperti belanja, penggalan potensi penerimaan daerah yang mandiri, alokasi transfer pemerintah pusat, dan lain-lain, sehingga implementasi desentralisasi fiskal dapat dilihat dari perubahan pada sisi pendapatan asli daerah, transfer ke daerah, dan belanja.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang diizinkan menurut peraturan

perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022). Peningkatan jumlah PAD dari sumber-sumber tersebut dapat mengindikasikan keberhasilan pengelolaan potensi dan sumber daya pendapatan daerah oleh pemerintah daerah yang juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal (Pasaribu, 2020). Apabila PAD memberikan kontribusi terbesar, hal ini menandakan bahwa daerah tersebut maju dalam sektor ekonomi dan tidak bergantung terhadap dana transfer dari pusat (Sari et al., 2019).

Salah satu cara mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah adalah dengan menggunakan rasio *Local Fiscal Autonomy* (LFA). Semakin tinggi rasio LFA, maka semakin besar proporsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Artinya, daerah menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer.

Transfer ke Daerah

TKD merupakan alokasi dana dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang daerah (Republik Indonesia, 2022). TKD terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

TKD, yang dahulu dikenal sebagai Dana Perimbangan, seringkali disebut sebagai dana transfer (*grant*) yang diberikan sebagai respons terhadap ketidakseimbangan ekonomi dan keuangan antardaerah (Wulandari & Iryanie, 2017).

TKD bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan

independensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan (Wahyudin & Hastuti, 2020). Transfer ini juga bertujuan untuk memperbaiki penyediaan pelayanan publik agar mencapai standar minimum kualitasnya dan meningkatkan stabilitas perekonomian daerah (Pasaribu, 2020).

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan daerah atau upaya pengembangan daerah (Maulina et al., 2021).

DAU, DBH, dan DAK memiliki tujuan yang berbeda (Republik Indonesia, 2022). DAU ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dan kapasitas keuangan daerah, DAK untuk mendanai program prioritas pemerintah pusat dengan penggunaan dana yang spesifik, dan DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternal, khususnya di daerah non-penghasil, demi menciptakan kesetaraan regional.

DAU adalah dana umum yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat (*block transfer*) dengan kebebasan penggunaan untuk pemerintah daerah, memberikan fleksibilitas alokasi dana sesuai kebutuhan lokal. Sementara DAK merupakan dana spesifik dengan tujuan dan program yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Local Dependence on Fiscal Transfer merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Semakin tinggi rasio tersebut, berarti sebuah daerah

memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat.

Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup segala kewajiban finansial daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersihnya selama satu periode anggaran (Republik Indonesia, 2022). Belanja daerah dapat disusun melalui beberapa strategi penyusunan belanja daerah seperti penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, serta penganggaran berbasis kinerja.

Alokasi dana belanja daerah yang dilakukan dengan akurat ke berbagai sektor yang dibutuhkan oleh warga akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zebua & Adib, 2014). Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan setidaknya 40% dari total APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik (di luar dana bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran daerah yang difokuskan pada infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal Daerah

Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran untuk pembelian aset tetap serta aset lain yang dapat digunakan dan akan memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun akuntansi (Republik Indonesia, 2010). Jenis pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, pembuatan infrastruktur seperti irigasi,

jalan, dan sistem jaringan, serta investasi dalam aset tetap yang lain.

Belanja modal memungkinkan pemerintah untuk memiliki aset tetap yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan publik. Dalam rangka memperkuat aset tetap, alokasi anggaran khusus dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal dalam APBD (Saputra et al., 2021). Ruang lingkup belanja modal daerah pada penelitian ini adalah belanja modal daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sampang.

Alokasi dana untuk belanja modal daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah akan infrastruktur dan fasilitas yang esensial baik untuk operasional pemerintahan maupun layanan publik. Dengan meningkatkan belanja modal, diharapkan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya dapat memacu perkembangan ekonomi daerah (Setiawan & Harsono, 2020)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi aktivitas ekonomi yang menjadi metode utama untuk meningkatkan penghasilan warga dan menciptakan kesempatan kerja baru (Boediono, 2009). Dengan kata lain, semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, meski perlu juga memperhatikan faktor lain seperti distribusi pendapatan (Waryanto, 2017).

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada perbaikan layanan publik,

pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi dari dalam dan luar negeri, serta revitalisasi lingkungan dan pengembangan sektor pertanian melalui pertumbuhan ekonomi (Saad & Kalakech dalam Iskandar, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik menggunakan PDRB Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Penelitian ini menggunakan PDRB Harga Konstan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Beragam studi terdahulu telah menyelidiki pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan berbagai kesimpulan. Penelitian Sulaeman & Silvia (2019) menemukan bahwa aspek desentralisasi fiskal (PAD, DAU, dan DBH) dan belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi sebaliknya DAK tidak berpengaruh signifikan.

Sementara itu, menurut penelitian Tuwo et al. (2021), pengaruh PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. Sebaliknya, belanja modal daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika dianalisis secara bersamaan/simultan, tidak ada pengaruh signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Setiawan & Harsono (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Pamekasan menemukan variabel PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengaruh belanja modal

daerah tidak berpengaruh signifikan. Namun, melalui analisis simultan mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dari kedua variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam studi lain yang dilakukan oleh Alvaro (2022), ditemukan bahwa belanja modal daerah dan unsur desentralisasi fiskal (PAD, DAU, dan DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten-kabupaten daerah tertinggal. Namun, DBH tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Analisis

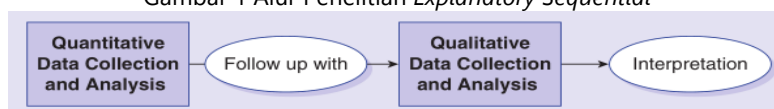
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan campuran (kombinasi kuantitatif dan kualitatif) dengan desain *explanatory sequential*. Desain ini adalah desain penelitian yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam serta kontekstualisasi sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam (Creswell, 2014). Alur desain penelitian *explanatory sequential* dapat dilihat pada Gambar 1.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh aspek

desentralisasi fiskal (PAD dan TKD) dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi realisasi PAD, TKD, belanja modal daerah, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang dari tahun 2013 hingga 2022. Data sekunder tersebut bersumber dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tahun 2020 tidak dimasukkan dalam pengolahan data karena kondisi pandemi COVID-19. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data sekunder tersebut.

Sementara itu, pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk memperkuat analisis/pembahasan dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lain terhadap ekonomi Kabupaten Sampang serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang. Data kualitatif ini bersifat primer dan diperoleh dari observasi dan wawancara dengan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Data kualitatif ini merupakan bagian dari alur penelitian yang berfungsi untuk mengambil kesimpulan yang lebih komprehensif (Creswell, 2014).

Gambar 1 Alur Penelitian *Explanatory Sequential*



Sumber: Creswell, 2014

Kerangka Penelitian

Gambar 2 menunjukkan struktur kerangka penelitian berdasarkan latar belakang serta tinjauan literatur yang telah disebutkan sebelumnya.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model matematis yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_{PAD} + \beta_{TKD} + \beta_{BM} + \varepsilon \dots (1)$$

Keterangan

Y	: Pertumbuhan Ekonomi, dihitung menggunakan komponen PDRB
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
TKD	: Transfer ke Daerah
BM	: Belanja modal daerah
a	: Konstanta
β	: Koefisien masing-masing variabel independen
ε	: Error

Hipotesis Penelitian

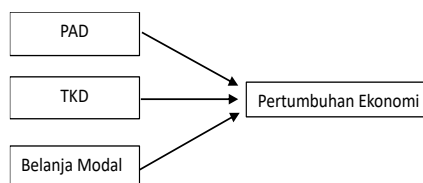
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait hubungan desentralisasi fiskal (PAD dan TKD) dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat pengaruh positif dari PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang
- H_2 : Terdapat pengaruh positif dari TKD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang
- H_3 : Terdapat pengaruh positif dari belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, dilakukan pemeriksaan asumsi klasik terhadap variabel-variabel yang digunakan sebelum menjalankan analisis regresi berganda. Asumsi klasik yang perlu

Gambar 2 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah peneliti

dipenuhi adalah asumsi normalitas (data berdistribusi normal), tidak terjadi heteroskedastisitas (varians *error term* untuk semua variabel independen bernilai konstan), tidak terjadi autokorelasi (*error term* variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain), dan tidak terjadi multikolinearitas (variabel independen tidak berkorelasi dengan variabel independen yang lain) (Gujarati & Porter, 2009).

Objek uji asumsi klasik adalah variabel independen (yang meliputi pertumbuhan ekonomi) dan variabel dependen (yang meliputi PAD, TKD, dan Belanja Modal Daerah). Penelitian dilakukan terhadap seluruh PAD, TKD, dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sampang periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan data populasi karena mencakup seluruh data tahunan yang tersedia terkait variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), Belanja Modal Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang, pada tahun 2013-2022. Pengecualian hanya dilakukan pada data tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakwajaran dalam data ekonomi, sehingga data tersebut tidak mencerminkan kondisi normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

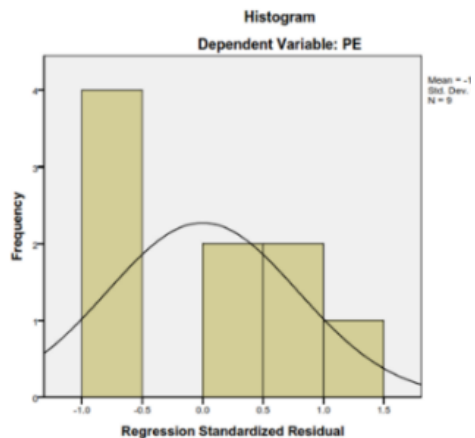
Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan pada data dan variabel yang digunakan pada penelitian sebelum dilakukan analisis regresi berganda. Pengujian ini diperlukan agar tidak terjadi bias dalam model yang dihasilkan (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini dilakukan pengujian normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Grafik 3 dan Tabel 1 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data pada penelitian ini. Hasil uji histogram menunjukkan data memiliki kecondongan (*skewness*) akan tetapi hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil $0.176 > 0.05$. Hasil ini memenuhi hipotesis normalitas, dengan kata lain model ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji kedua adalah uji multikolinieritas. Hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas, karena setiap variabel bebas/independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,100$.

Grafik 3 Hasil Uji Histogram



Sumber: Diolah peneliti

Berikutnya, *Runs Test* dijalankan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini. Hasil *Runs Test* tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah $0,445 > 0,05$ menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model yang dianalisis.

Uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas menggunakan diagram berserak (*scatterplot*) dengan sumbu X yaitu nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dan sumbu Y yaitu

Tabel 1 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	218.3160420
Most Extreme Differences	Absolute	.232
	Positive	.232
	Negative	-.153
Test Statistic		.232
Asymp.Sig. (2-tailed)		.176 ^c

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors significance correction

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7277.018	730.862		9.957	.000	
PAD	7.235E-9	.000	.322	2.707	.042	.571
TKD	4.738E-9	.000	.806	7.016	.001	.612
BM	-3.716E-9	.000	-.436	-4.502	.006	.853

Model	Collinearity Statistics	
	VIF	
1 (Constant)		
PAD		1.752
TKD		1.634
BM		1.172

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Diolah peneliti

nilai residu yang terstandarisasi (SRESID) seperti yang terlihat pada Gambar 3 berikut.

Dalam *scatterplot* pada Gambar 3, data menyebar di atas dan di bawah angka nol tanpa pola yang konsisten, yang mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model.

Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Setelah model terkonfirmasi memenuhi asumsi klasik, analisis berlanjut ke uji hipotesis yang meliputi uji T (uji hipotesis parsial) dan uji F (uji hipotesis simultan). Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil nilai signifikansi dan t_{tabel} pada Tabel 4, ditemukan bahwa secara parsial pengaruh variabel PAD, TKD, dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan karena memiliki nilai signifikansi $<0,05$ (dalam taraf signifikansi 5%) dan memiliki $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ (2,571).

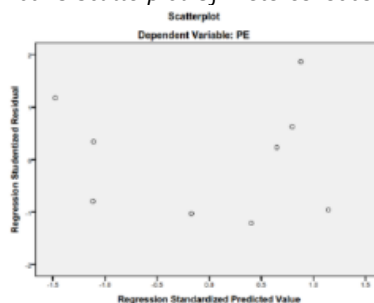
Sementara itu, berdasarkan hasil uji F (ANOVA) pada Tabel 5 ditemukan semua variabel bebas/independen

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	53.97792
Cases < Test Value	4
Cases > = Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	7
Z	.763
Asymp. Sig. (2-tailed)	.445

a. Median

Sumber: Diolah peneliti

Gambar 3 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah peneliti

(PAD, TKD, dan belanja modal daerah) berpengaruh signifikan secara bersama-sama/simultan dengan nilai f_{hitung} (39,6611) $>$ f_{tabel} (4,76) dan nilai signifikansi 0,001 ($<$ 0,05).

Terakhir, setelah model lulus uji asumsi klasik dan uji hipotesis, analisis dapat diteruskan ke analisis regresi. Hasil regresi ditampilkan pada Tabel 4, sehingga dapat disusun model matematis sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_{PAD} + \beta_{TKD} + \beta_{BM} + \varepsilon$$

$$= 7277,018 + 7,235E - 9_{PAD}$$

$$+ 4,738E - 9_{TKD}$$

$$- 3,716E - 9_{BM} + \varepsilon$$

Analisis Variabel PAD

Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dari variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Sulaeman &

Silvia (2019), Tuwo et. al. (2021), dan Alvaro (2022) yaitu PAD suatu daerah yang tinggi menunjukkan daerah tersebut memiliki ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat yang rendah dan mempunyai kebebasan serta fleksibilitas dalam perencanaan anggaran dan konsisten dengan agenda ekonomi setempat.

Pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi mempunyai kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyusun perencanaan alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan yang sejalan dengan program perekonomian daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada peningkatan layanan publik dan infrastruktur ekonomi. Kenaikan PAD memperkuat kemandirian finansial daerah, memfasilitasi pembiayaan program yang disesuaikan

Tabel 4 Output Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	72777.018	730.862			9.957	.000	
PKD	7.235E-9	.000	.322	2.707	.042	.571	
TKD	4.738E-9	.000	.806	7.016	.001	.612	
BM	-3.716E-9	.000	-.438	-	4.502	.006	.853

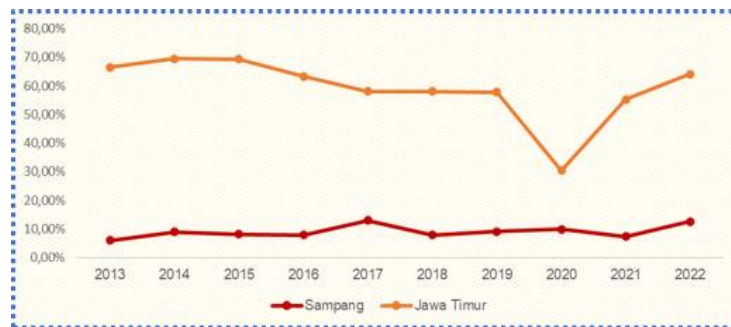
Sumber: Diolah peneliti

Tabel 5 Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9062011.967	3	3020670.656	39.611	.001 ^b
Residual	381295.153	5	76259.031		
Total	9443307.120	6			

a. Dependent Variable: PE
b. Predictors: (Constant), BM, TKD, PAD

Sumber: Diolah peneliti

Grafik 4 *Local Fiscal Autonomy (LFA) Kabupaten Sampang (2013-2022)*

Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

Grafik 5 *Local Dependence on Fiscal Transfer Kabupaten Sampang (2013-2022)*

Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

dengan kebutuhan spesifik daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

LFA adalah rasio yang digunakan untuk menentukan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan kemandirian daerah dalam hal fiskal. LFA Kabupaten Sampang cenderung fluktuatif dan tidak pernah melebihi 15% pada periode 2013-2022. Jika dibandingkan dengan LFA kabupaten/kota lain di Jawa Timur pada periode yang sama, Kabupaten Sampang masih berada di bawah rata-rata. Perkembangan LFA Kabupaten Sampang selama 10 tahun dapat dilihat pada Grafik 4.

Analisis Variabel TKD

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Sampang dari variabel TKD. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Sulaeman & Silvia (2020) yang menemukan bahwa transfer daerah, khususnya DAU dan DBH, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAU berkontribusi signifikan dalam pendanaan belanja daerah, termasuk belanja pegawai, infrastruktur, dan kebutuhan daerah lainnya (Ginting, 2016). Oleh karena itu, DAU sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan komponen transfer daerah lainnya juga penting karena mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan daerah yang berujung pada stimulasi pertumbuhan ekonomi.

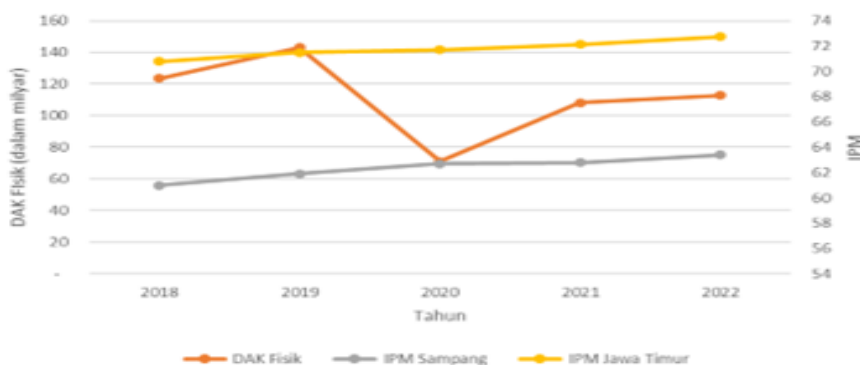
Proporsi TKD dalam struktur pendapatan Kabupaten Sampang dapat dilihat melalui rasio *local dependence on fiscal transfer* yang dihitung dengan membandingkan antara total TKD dengan total pendapatan daerah. *Local dependence on fiscal transfer* Kabupaten Sampang mencapai titik tertinggi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. Selama periode tersebut, rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Sampang lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Perkembangan rasio *local dependence on fiscal transfer* Kabupaten Sampang selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 5.

Local Dependence of Fiscal Transfer Kabupaten Sampang selama 10 tahun terakhir selalu di atas 70% dengan proporsi realisasi DAK Fisik di Sampang menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan tajam di 2013. Meskipun tujuan DAK Fisik adalah meningkatkan IPM dengan mengurangi kemiskinan, masih ada gap yang signifikan antara tujuan ini dan realisasi DAK Fisik, yang tergambar dalam Grafik 6.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa di Kabupaten Sampang, sektor pendidikan dan kesehatan mendominasi alokasi DAK Fisik, sedangkan sektor seperti pertanian, perikanan, dan irigasi—yang merupakan kontributor utama PDRB—menerima jauh lebih sedikit alokasi DAK. Sektor perdagangan, meski merupakan kontributor kedua terbesar PDRB, belum menerima alokasi DAK Fisik sejak tahun 2020. Situasi ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih teliti dalam mengusulkan proyek-proyek yang memerlukan pendanaan DAK untuk memajukan ekonomi daerah. Data alokasi DAK Fisik dari tahun 2018 hingga 2022 tersedia pada Tabel 6.

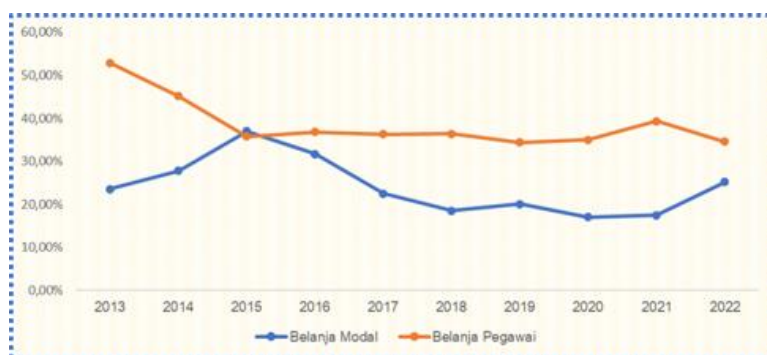
Dari wawancara dengan Kepala BPPKAD Kabupaten Sampang, didapatkan data bahwa alokasi TKD untuk sektor pertanian dan perikanan terbatas, karena penggunaan TKD telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengurangi fleksibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengalokasikan TKD untuk sektor pertanian dan perikanan dalam rangka

Grafik 6 Perbandingan DAK Fisik dengan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Sampang (2018-2022)



Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

Grafik 7 Proporsi Belanja Modal Daerah dan Belanja Pegawai Kabupaten Sampang tahun 2013-2022



Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah usaha Kabupaten Sampang meningkatkan PAD.

Selama periode 2013-2022, TKD bersama PAD telah digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja modal daerah di Kabupaten Sampang. Namun, pada periode tersebut rata-rata proporsi belanja modal daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja pegawai, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 7. Berdasarkan grafik tersebut, proporsi belanja pegawai Kabupaten Sampang cenderung di atas 30% dari total APBD sementara belanja modal daerah cenderung di bawah 40% dari total APBD selama 10 tahun terakhir.

UU HKPD menyatakan bahwa beberapa pos belanja wajib dialokasikan dalam proporsi tertentu terhadap APBD. Pos tersebut adalah belanja pegawai (selain tunjangan guru) yang tidak boleh melebihi dari 30% terhadap total APBD (pasal 146) serta pos belanja pelayanan publik dan infrastruktur yang wajib dialokasikan paling rendah 40% dari keseluruhan belanja APBD di luar belanja bagi hasil, TKD, dan dana desa (pasal 147).

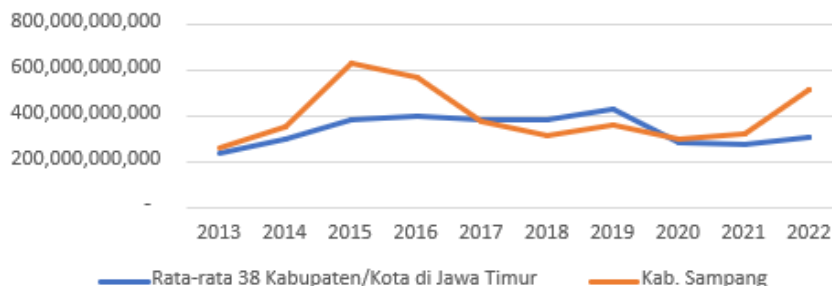
Kabupaten Sampang harus menyesuaikan alokasi anggaran sesuai UU HKPD, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi TKD sesuai UU HKPD, khususnya untuk belanja pegawai dan infrastruktur, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Analisis Variabel Belanja Modal Daerah

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Tuwo et al. (2021), yang juga mencatat bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Waryanto, 2017).

Dengan kata lain, peningkatan pada belanja modal tidak selalu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Islamiah (2015) menambahkan bahwa efek negatif ini sering disebabkan

Grafik 8 Belanja Modal Daerah Kabupaten Sampang dan Rata-Rata 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2022



Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

oleh keterbatasan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan banyak terpakai untuk pengeluaran rutin, sehingga alokasi belanja modal menjadi kecil. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan alokasi belanja modal pada proyek investasi dengan potensi dampak ekonomi besar.

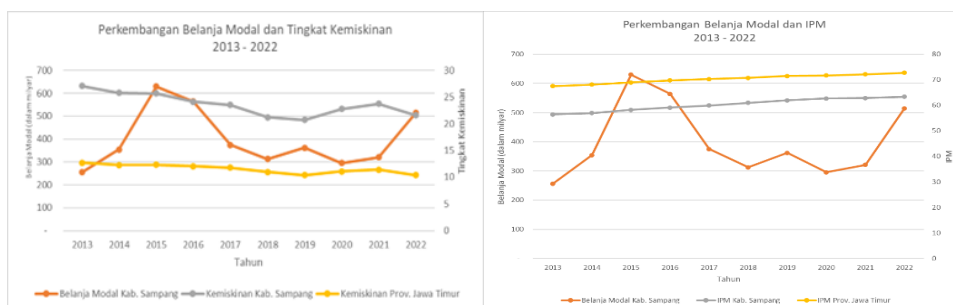
Selama dekade terakhir, belanja modal Kabupaten Sampang umumnya lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Timur, sesuai dengan data Grafik 8. Namun, belanja ini belum efektif dalam meningkatkan IPM atau mengurangi tingkat kemiskinan, seperti yang terlihat

dari gap antara belanja modal dengan IPM dan tingkat kemiskinan pada tahun 2018-2022, pada Grafik 9.

Hasil analisis realisasi belanja modal daerah berdasarkan LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi belanja modal Kabupaten Sampang belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu:

Pertama, belanja modal daerah belum diprioritaskan pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, yaitu sektor pertanian dan perikanan. Realisasi belanja modal

Grafik 9 Perbandingan Belanja Modal Daerah dengan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Sampang (2018-2022)



Sumber: LKPD Kabupaten Sampang, 2013-2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pembelian peralatan dan mesin hanya sebesar Rp 945.960.610 (0,18% dari total realisasi belanja modal daerah), sedangkan realisasi belanja modal berupa mesin dan peralatan oleh Dinas Perikanan sebesar Rp32.399.780 (hanya 0,006% dari total realisasi belanja modal daerah).

Kedua, pada tahun 2022, terdapat pengadaan aset yang tidak produktif meliputi belanja modal tanah dan bangunan untuk tempat kerja atau tempat tinggal, belanja modal pengadaan konstruksi monumen peringatan, dan belanja modal tanda batas daerah berupa tugu.

Ketiga, berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Sampang tahun 2018-2022, ditemukan bahwa dalam pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terdapat kekurangan volume dengan rincian pada Tabel 6.

Efektivitas belanja modal daerah di Kabupaten Sampang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terhambat karena belum fokus pada sektor dengan efek pengganda besar. Analisis Data Distribusi PDRB Lapangan Usaha periode 2018-2022 menunjukkan bahwa lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Penggunaan yang tidak tepat sasaran atas belanja modal dapat

Tabel 7 Temuan BPK atas Kekurangan Volume Pekerjaan Infrastruktur

Tahun	Jumlah Paket	Kelebihan Pembayaran (Rp)
2018	19	600.495.191,13
2019	8	1.088.288.839,31
2020	11	1.298.956.311,63
2021	13	418.854.595,93
2022	5	1.132.690.587,72

Sumber: LHP BPK 2018-2022

berakibat pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai.

Hambatan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Sampang

Potensi lokal merupakan kunci untuk meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal suatu daerah. Kabupaten Sampang memiliki potensi yang signifikan dalam sektor pertanian garam, bawang merah, dan budidaya udang vaname. Hal ini ditunjukkan dengan Kabupaten Sampang memiliki lahan budidaya garam terbesar di Indonesia, bawang merah sebagai komoditas unggulan di sektor pertanian, dan ekspor udang vaname.

Namun, penelitian di lapangan mengungkapkan adanya berbagai hambatan yang menghambat pengembangan potensi ini. Untuk pertanian garam, isu utamanya adalah kualitas garam yang rendah, hanya sesuai untuk konsumsi, dan kekurangan infrastruktur jalan. PT. Garam, yang beroperasi di daerah ini, tidak bekerjasama dengan petani lokal dan malah menjadi kompetitor dengan memproduksi garam sendiri.

Di sisi lain, pengembangan bawang merah dihadapkan pada kurangnya infrastruktur irigasi, gudang, dan *blower* pengering, serta biaya produksi yang

tinggi untuk pupuk dan benih. Para petani juga mengalami keterbatasan dalam hal pemasaran dan belum bisa mengolah bawang merah menjadi produk dengan nilai tambah. Sementara itu, budidaya udang vaname mengalami kendala serupa, termasuk infrastruktur budidaya dan peralatan yang belum memadai. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sempat merencanakan pembangunan 'Minapolitan' dan 'Agropolitan' untuk memajukan komoditas unggulan ini, namun rencana tersebut gagal terlaksana akibat *refocusing* anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PAD berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang, namun dengan kemandirian fiskalnya rendah, tidak melebihi 15% dan merupakan salah satu yang terendah di Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak dan retribusi yang tidak optimal serta kerugian BUMD. Selain itu, meskipun TKD mendukung pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sampang masih bergantung besar pada dana pusat dengan rasio ketergantungan sekitar 80,15%, menandakan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat dan alokasi belanja pegawai yang tidak memenuhi standar peraturan.

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa belanja modal daerah di Kabupaten Sampang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonominya, karena tidak terfokus pada sektor-sektor ekonomi utama, minimnya investasi pada aset produktif, dan kekurangan volume pekerjaan infrastruktur. Untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi, diperlukan manajemen dan alokasi belanja modal daerah yang lebih efektif serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan PAD.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang perlu meningkatkan PAD dengan menyediakan fasilitas publik yang lebih baik, mendorong masyarakat untuk taat pajak, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tentang potensi pajak, serta merestrukturisasi BUMD PT. Geliat Sampang Mandiri.

Selain itu, perlu ada penyesuaian alokasi TKD untuk belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja, sesuai peraturan, untuk memungkinkan alokasi anggaran lebih banyak ke sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan proyek untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai spesifikasi.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini terfokus pada analisis belanja modal infrastruktur dari APBD Kabupaten Sampang selama 2018-2022, tanpa memasukkan belanja modal yang dibiayai langsung oleh pemerintah pusat, sehingga keterbatasan ini mengurangi kemampuan studi untuk merefleksikan dampak penuh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian mendatang disarankan untuk memasukkan alokasi APBN yang langsung diperuntukkan untuk proyek di Kabupaten Sampang dan mempertimbangkan faktor-faktor

nonekonomi dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

REFERENSI

- Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 256–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.132>
- Boediono. (2009). *Ekonomi Indonesia, mau kemana?: kumpulan esai ekonomi* (Z. Rofiq, Ed.; 1st ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Fisher, R. C. (2022). *State and local public finance* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003030645>
- Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 1(2), 185–206. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i2.96>
- Iskandar, I. (2017). Effect of human development index fund on economic growth through a special autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 40–49. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i1.2920>
- Islamiah, N. (2015). Analisis pengaruh belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia. *Economix*, 3(1), 46–57. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/3956>
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming public service delivery: A comprehensive review of digitization initiatives. *Sustainability*, 16(7), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Mandala, R. A. M. (2020). *Inflation, government expenditure, and economic growth in Indonesia*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6961>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mittal, A., & Naqvi, A. H. (2017). A Comparison of fiscal capacity of states in India: A regression approach. In N. A. Khan (Ed.), *Challenges and Issues in Indian*

- Fiscal Federalism* (31–45). Springer.
<http://www.springer.com/series/11234>
- Nurhemi, & Suryani, G. R. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbanka*, 18(2), 183–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>
- Pasaribu, S. H. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 191–201.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249.
<https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Saputra, Muh. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization, and local financial independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250.
<https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Setiawan, D. A., & Harsono. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 71–85.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5439>
- Shahidi, F. V., Ramraj, C., Sod-Erdene, O., Hildebrand, V., & Siddiqi, A. (2019). The impact of social assistance programs on population health: A systematic review of research in high-income countries. *BMC Public Health*, 19(1).
<https://doi.org/10.1186/s12889-018-6337-1>
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan asli daerah, transfer daerah, dan belanja modal, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4), 79–90.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/36445>

- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah* (1st ed., Vol. 1). Deepublish.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Zebua, W. F., & Adib, N. (2014). Pengaruh alokasi belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap kualitas pembangunan manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 1–20. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1491>